

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan. Iii, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 81.
- Antoni Putra, *Kertas Advokasi Kebijakan Atas Uu No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Penerbit Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Pshk), Jakarta, 2020, P.5.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuna Ilmu Poluler, Jakarta, Edisi ketiga, 2004, hal. 99 – 100.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* . Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997. Hal. 86.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm.27-28.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), Hlm. 76-77.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indoneseia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 102.
- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakakarta. Pradnya Paramita, 2004. Hal. 37.
- Dikdik F. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 2007, Hal. 45-46.
- Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta, Cetakan 1, Genta Publishing. Hal. 5.

- Hendri Raharjo (2013), *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2013. Hal. 18.
- J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Prenhalindo. 2001. Hal. 9328.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012. Hal, 2.
- John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), H.207.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006. Hal. 302-303.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: Nusa Aulia, 2014, Hal. 3
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 103.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, 2012. Hal 193.
- Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Prespektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:Nusamedia, 2017, Hal. 14
- Muladi, *Hak Asasi Manusa : Hakekat. Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refina Aditama, Bandung, 2005, hal. 108.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011. Hal. 35.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 10.

- Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung., Hal. 54.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm 23.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 13
- Soetan. K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STBH, Bandung, 1991. Hal. 83.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006. Hal. 43.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu. Hal. 78.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006. Hal. 43.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, 2007. Hal. 31.

Jurnal

- Bawole, G. (2019). Implementasi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 8(2).

- Darmayanti, E., & Gunawan, P. I. K. (2017). Studi Tentang Advokasi Kasus Lubang Tambang Oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur.
- Farber, D. A. (1992). Politics and procedure in environmental law. *JL Econ. & Org.*, 8, 59.
- González, R. C. (2013). Punitive damages and their alternatives in Mexican environmental law. *Mexican law review*, 6(1), 45-74.
- Irsan, I., & Utama, M. (2019). The Political Law on Coal Mining in the Fulfilment of People's Welfare in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(1), 11-25.
Hal. 13
- Ketut Purwata, I. (2019). Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata. *Media Bina Ilmiah*, 13(8), 1415-1432.
- Nurhasanah, S. R. P., Evelina, S., & Jannah, D. A. M. R. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 98-111.
- Rawung, J. E. (2013). Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 2(5).

- Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399-420
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1996), Hlm. 63.
- Sularman, A., & Ma'ruf, U. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 387-396.
- Taufiqurrahman, M., Emirzon, J., & Saptawan, A. (2022). The Effectiveness of the Role of Civil Servant Investigators in Enforcement of Environmental Law. *Sriwijaya Journal of Environment*, 7(1), 26-32.
- Telaumbanua, D. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 101-112.
- Widowaty, Y. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 154-169.

Tugas Akhir/Disertasi

- Ahmadiy, *Lingkungan dan Alam Dalam Al-Qur'an*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, 2019. Hal. 104-105.
- Ananda, A. P. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap pengguna Grabcar sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Medan menurut Hukum Positif*

Indonesia (Studi Kasus: Grab Indonesia PT. Aria Ruth Deory) (Doctoral dissertation).

Faturrahman, F. I. (2017). *Perlindungan Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Manurung, I. E. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*.

Paulus Hadisuprpto, *Viktimologi : Perkembangan Konsep dan Kajiannya*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 15.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelah Maret. 2004. Hal. 3.

Widowaty, Y. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).

Yulianingrum, A. V., Absori, S. H., & Khudzaifah Dimyati, S. H. (2021). *Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Internet

Dimuat dalam <https://kbbi.web.id/korporasi> yang diunggah pada tanggal 19 Maret
2022, pukul 09.45 WITA.